

Manajemen Pemberdayaan Perempuan Petani untuk memperkuat Ketahanan Pangan Keluarga

Management of Women Farmers' Empowerment to Strengthen Family Food Security

Tinneka E.M. Sumual^{1*}, Listriyanti Palangda², Anas Romzy Hibrida³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 September 2026
Revised 21 September 2026
Accepted 30 September 2026
Available online 06 October 2026

Keywords

Empowerment Management; Female Farmers; Household Food Security



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This paper aims to analyze the management of female farmer empowerment to strengthen household food security in North Minahasa Regency. The research method employed a descriptive qualitative approach. Information and data were collected through in-depth interviews, observation, and document review, which were then validated using data triangulation and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that the management of female farmer empowerment is carried out through integrated cross-sectoral planning functions and program implementation strategies focusing on three main capitals: human capital strengthening (food literacy, financial, and entrepreneurship training), technology capital (provision of processing facilities and technology), and organisational capital (strengthening Women Farmers Groups/KWT and business legality). The empowerment program has a positive and significant effect on the transformation of women's roles as decision-makers, local food product diversification, and enhancing household capacity to manage food availability, access, utilization, and sustainability.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemberdayaan perempuan petani dalam rangka memperkuat ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informasi dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta penelusuran dokumen, yang kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi data dan dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemberdayaan perempuan petani dilakukan melalui fungsi perencanaan lintas sektoral yang terintegrasi dan strategi implementasi program yang berfokus pada tiga modal utama, yaitu penguatan human capital (pelatihan literasi pangan, keuangan, dan kewirausahaan), technology capital (bantuan sarana dan teknologi pengolahan), serta organisational capital (penguatan kelembagaan Kelompok Wanita Tani/KWT dan legalitas usaha). Program pemberdayaan ini memberikan efek positif yang signifikan terhadap transformasi peran perempuan sebagai pengambil keputusan, diversifikasi produk olahan lokal, serta peningkatan kemampuan keluarga dalam mengusahakan ketersediaan, akses, pengelolaan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian di pedesaan menempatkan rumah tangga petani sebagai unit sosial-ekonomi yang krusial dalam pembangunan sumber daya manusia. Di dalam unit domestik tersebut, perempuan memegang peran ganda yang sangat strategis, baik sebagai pelaksana kegiatan budidaya pertanian, pengelola pangan keluarga, pengatur konsumsi rumah tangga, maupun sebagai pendukung keberlanjutan ekonomi keluarga.

Realitas empiris ini terlihat jelas di Kabupaten Minahasa Utara, di mana dinamika sektor pertanian terus menjadi fondasi utama pembangunan daerah (BPS, 2023; 2025). Secara khusus di Kecamatan Likupang Timur, berdasarkan data BPS tahun 2023, tercatat sebanyak 683 perempuan berusaha di sektor pertanian, dengan sebagian besar terkonsentrasi pada subsektor tanaman pangan yang menjadi prioritas kedua setelah perkebunan. Karakter ekonomi yang

bertumpu pada sektor pertanian ini menjadikan wilayah tersebut sebagai konteks empiris yang sangat menarik untuk diteliti.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya sebuah paradoks: tingginya tingkat partisipasi dan keterlibatan perempuan tani tersebut belum berbanding lurus dengan penguatan ketahanan pangan keluarga secara optimal. Peran perempuan seringkali masih terbatas sebagai tenaga kerja tambahan atau pelaksana domestik tanpa diiringi oleh kontrol yang memadai terhadap hasil dan keputusan ekonomi rumah tangga, sehingga kapasitas diri mereka belum memberikan dampak positif yang maksimal bagi ketahanan pangan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural yang dihadapi oleh perempuan di sektor agraris. Merujuk pada temuan Gupta Soumya et al. (2019), akar utama ketidakberdayaan perempuan bersumber dari rendahnya keanggotaan dalam kelompok swadaya pertanian, minimnya kepemilikan lahan, serta lemahnya kendali atas pendapatan. Diperkuat oleh laporan FAO (2023) serta studi mutakhir dari Sassi (2026), perempuan dalam sistem *agrifood* masih menghadapi kesenjangan akses terhadap sumber daya produktif, pelatihan teknologi, layanan penyuluhan, pembiayaan, dan ruang kepemimpinan—di mana dimensi agensi ini memiliki korelasi linier yang sangat signifikan dalam menanggulangi kerentanan pangan keluarga.

Tantangan marginalisasi ini pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap dimensi ketahanan pangan itu sendiri. Dalam kerangka FAO (2019), ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Sejalan dengan kajian *Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Indonesia* dari FAO serta riset terkait Kelompok Wanita Tani (Yanti & Ibrahim, 2021; Loviana et al., 2026), ketahanan pangan keluarga tidak cukup dipahami hanya dari sisi produksi makro, melainkan dari sejauh mana perempuan memiliki akses dan pengelolaan sumber daya rumah tangga di tengah tekanan ekonomi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan keluarga petani mutlak harus dilihat sebagai agenda penguatan kapasitas perempuan itu sendiri (Hammad et al., 2025).

Dari perspektif Ilmu Manajemen, perempuan dalam keluarga petani perlu diposisikan bukan sekadar sebagai tenaga kerja tambahan, melainkan sebagai aset sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pengalaman, motivasi, pengetahuan lokal, kemampuan adaptasi, dan potensi kepemimpinan. Manajemen pemberdayaan perempuan dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup pengembangan kapasitas, perluasan partisipasi dalam pengambilan keputusan, peningkatan kontrol atas sumber daya, serta penguatan posisi perempuan dalam jaringan kelembagaan. Sejalan dengan temuan Quisumbing et al. (2022) serta Sassi (2026), manakala pemberdayaan ini dikelola secara terstruktur, dampaknya akan langsung beresonansi pada peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan kesejahteraan rumah tangga.

Meskipun hubungan antara pemberdayaan perempuan dan ketahanan pangan telah banyak dibahas, sebagian besar literatur mutakhir umumnya masih berfokus pada kerangka makro gender secara umum, tanpa membedah secara mendalam aspek proses manajerialnya dalam basis rumah tangga petani lokal. Oleh karena itu, bertolak dari fenomena spesifik di Kecamatan Likupang Timur hingga kerangka konseptual yang komprehensif, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dua hal utama, yaitu: 1) Manajemen pemberdayaan petani perempuan, yang meliputi aspek perencanaan dan implementasi program/aktivitas pemberdayaan; serta 2) Efek atau dampak pemberdayaan tersebut terhadap perempuan petani dan ketahanan pangan keluarganya.

LITERATURE REVIEW

Konsep Manajemen dalam Pemberdayaan

Manajemen sangat dibutuhkan dalam program pemberdayaan. Sebagai suatu program strategis pemerintah, pemberdayaan memerlukan sentuhan manajemen yang transparan dan akuntabel agar pelaksanaannya tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Richard Daft (2010) menjelaskan bahwa *"Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources."*

Pemahaman tentang manajemen dapat pula didalami dari definisi lain bahwa manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian suatu organisasi atau usaha untuk mencapai suatu tujuan (Creech & Leung, 2012). Henry Fayol merekomendasikan bahwa manajemen adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dari *planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling* (Sumual et al., 2019; 2023).

Manajemen pemberdayaan perempuan petani merupakan suatu proses kerja sama dalam menjalankan pemberdayaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan manajemen ini dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, hingga pengontrolan: 1) Perencanaan (*Planning*): Berkaitan dengan perencanaan sumber daya (manusia, material, keuangan, teknologi, dan metode) yang digunakan dalam pemberdayaan; 2) Pengorganisasian (*Organizing*): Kegiatan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya nonmanusia berupa material, uang, fasilitas, dan teknologi; 3) Penggerakkan/Implementasi (*Leading/Actuating*): Terkait dengan kegiatan pelaksanaan di lapangan, termasuk di dalamnya sinkronisasi, integrasi, koordinasi, dan komunikasi; 4) Pengawasan (*Controlling*): Suatu kegiatan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana dan tujuan pemberdayaan, serta bagaimana tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Konsep, Strategi, dan Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan berhubungan erat dengan perbaikan hasil pembangunan pertanian, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan pangan rumah tangga. Pemberdayaan bukan hanya penting, melainkan menjadi kebutuhan bagi mereka yang belum memiliki kapasitas diri, mengalami keterbatasan ekonomi, serta memiliki keterbatasan akses teknologi. Mandal (2013) menegaskan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah *"power"* (kekuatan). Konsep yang senada diutarakan oleh Sedarmayanti (2009) bahwa pemberdayaan berasal dari kata *power* yang berarti kendali, kewenangan, dan dominasi (*control, authority, dominion*). Awalan *emp-* berarti memasukkan ke dalam atau melingkupi, yang secara jelas dimaknai sebagai menjadi lebih berdaya dari sebelumnya yakni memiliki wewenang, tanggung jawab, serta peningkatan kemampuan individual.

Moscovitch dan Drover (dalam Lord & Hutchison, 2011) menjelaskan pemberdayaan dengan membedakan antara konsep *power* (berdaya) dan *unpowered* (tidak berdaya). Para ahli lain melihat pemberdayaan dari aspek peningkatan kapasitas diri seseorang (Kabeer, 2002; Karlberg, 2005; Galiè et al., 2017). Alsop, Heinsohn, dan Somma mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat pilihan serta mewujudkan pilihan-pilihan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang diinginkan. Inti dari proses ini adalah tindakan yang tidak hanya membangun aset individu dan kolektif, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam konteks organisasi dan kelembagaan yang mengatur pemanfaatan aset tersebut (Cornwall, 2016).

Perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketahanan pangan berkelanjutan sehingga perlu diberdayakan secara komprehensif. Pemberdayaan perempuan

merupakan proses yang kompleks dan multidimensi yang bersifat dinamis, saling terkait, serta saling memperkuat. Dimensi-dimensi pemberdayaan tersebut mencakup: 1) Pemberdayaan Personal (*Personal Empowerment*): Tercermin pada karakteristik diri individu; 2) Pemberdayaan Sosial (*Social Empowerment*): Mengacu pada kekuatan yang memperkuat hubungan sosial perempuan dan posisi mereka dalam struktur sosial, serta terkait dengan penanganan diskriminasi sosial berdasarkan disabilitas, ras, etnis, agama, dan gender ; 3) Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Empowerment*): Berkaitan dengan kemandirian finansial dan ekonomi rumah tangga; 4) Pemberdayaan Edukatif (*Educational Empowerment*): Terkait dengan peningkatan literasi pengetahuan dan perubahan nilai-nilai kehidupan; 5) Pemberdayaan Psikologis (*Psychological Empowerment*): Tergambar pada motivasi dan kepercayaan diri individu. Pemberdayaan ini mencakup aspek kognitif dan psikologis, seperti pemahaman perempuan mengenai kondisi subordinasi yang dialaminya serta penyebab dari kondisi tersebut, yang dapat didorong melalui pendidikan (Dandona, 2015); 6) Pemberdayaan Teknis (*Technical Empowerment*): Mencakup penguasaan teknologi yang dipakai dalam proses pemberdayaan; 7) Pemberdayaan Politik (*Political Empowerment*): Tercermin pada kapasitas dan kebijakan untuk mendukung tujuan kelembagaan serta pengambilan keputusan publik.

Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan, sehingga fokusnya tidak hanya pada penguatan individu, tetapi juga pada pranata-pranatanya. Quisumbing dan Dick (2001) menjelaskan bahwa berbagai strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan modal, yaitu: 1) Modal Alam dan Fisik (*Natural and Physical Capital*): Sumber daya alam seperti tanah, air, pohon, ternak, serta aset fisik seperti bangunan, rumah, infrastruktur, dan teknologi yang bersifat *tangible* (berwujud); 2) Modal Manusia (*Human Capital*): Mencakup aspek pendidikan, pelatihan, dan kesehatan; 3) Modal Sosial dan Finansial (*Social and Financial Capital*): Seperti kerja sama kelompok, jaringan (*networking*), dan akses keuangan; 4) Hak Legal (*Legal/Political Capital*): Terkait kepastian hukum dan hak-hak politik.

Teori yang sama juga menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup kontrol atas sumber daya (fisik, manusia, intelektual, dan finansial) serta kontrol atas ideologi seperti keyakinan, nilai, dan sikap (Dandona, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Kasim et al. (2025) menegaskan bahwa strategi pemberdayaan perempuan tani yang berfokus pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan perluasan akses pasar terbukti efektif dalam meningkatkan peran perempuan tani sebagai agen perubahan untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Pada akhirnya, pemberdayaan perempuan menjadi faktor kunci untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga (Marapit et al., 2014). Kendati demikian, terdapat berbagai faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan tersebut, antara lain akses terhadap sumber daya (*access to resources*), dukungan sosial (*social support*), dan persepsi kebijakan (*policy perceptions*) (Sarker et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai manajemen pemberdayaan perempuan petani dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga di Kecamatan Likupang Timur. Informasi dan data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur kepada perempuan petani, Pemerintah Kecamatan Likupang Timur, serta pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, di mana instrumen dan teknik pengumpulan data kualitatif tersebut menuntut kedalaman interaksi agar informasi yang digali valid dan relevan dengan fokus studi (Pakpahan et al., 2021). Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh di lapangan, penelitian ini menerapkan triangulasi waktu dan sumber, yaitu dengan membandingkan konsistensi informasi antar-sumber dan waktu

yang berbeda (Moleong, 2021; Pakpahan et al., 2021). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan sistematis, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Pakpahan et al., 2021).

HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan temuan empiris hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi, dan penelusuran dokumen di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), wilayah ini memiliki sebanyak 683 perempuan yang berusaha di sektor pertanian, dengan konsentrasi terbesar pada subsektor tanaman pangan. Analisis data difokuskan pada dua aspek utama, yaitu proses manajemen pemberdayaan (perencanaan dan implementasi) serta efek positif pemberdayaan terhadap ketahanan pangan keluarga.

Analisis Manajemen Perencanaan dan Implementasi Pemberdayaan Perempuan Petani

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang divalidasi melalui triangulasi sumber antara perempuan petani, Pemerintah Kecamatan Likupang Timur, dan Dinas Kabupaten Minahasa Utara (Dinas Pertanian, Dinas Pangan, serta DP3A), diperoleh gambaran utuh mengenai alur manajemen pemberdayaan:

1. Tahap Perencanaan (*Planning*): Hasil wawancara dengan pihak Dinas Pertanian dan DP3A Kabupaten Minahasa Utara menunjukkan bahwa perencanaan pemberdayaan tidak berjalan secara sporadis, melainkan merujuk pada regulasi formal, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan secara kolaboratif ke dalam Rencana Kerja perangkat daerah. Dinas Pertanian berfokus pada penyediaan sarana produksi dan teknis budidaya, Dinas Pangan mengarahkan pada penganekaragaman konsumsi, sementara DP3A menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup dan penguatan kapasitas psikososial perempuan.
2. Tahap Pengorganisasian (*Organizing*): Melalui wawancara dengan aparat kecamatan dan pengurus kelompok, terungkap bahwa pengorganisasian dilakukan dengan membentuk dan mengaktifkan wadah kelembagaan kolektif, seperti Kelompok Wanita Tani (KWT). Kelembagaan ini berfungsi sebagai simpul integrasi sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang usahatani.
3. Tahap Penggerakkan dan Implementasi (*Actuating/Leading*): Implementasi di lapangan dijabarkan melalui tiga strategi utama berdasarkan data empiris:
 - a. *Pemberdayaan Berbasis Human Capital*: Dilaksanakan melalui penguatan literasi tanaman pangan dan gizi (pencegahan stunting), literasi keuangan usaha (pemisahan kas rumah tangga dan bisnis), pelatihan keterampilan wirausaha, bimbingan teknis *e-commerce*, pelatihan inovasi pengolahan hasil panen (pembuatan keripik pisang, ubi, dan kacang sangrai), serta pelatihan teknik pertanian organik/hidroponik.
 - b. *Pemberdayaan Berbasis Technology Capital*: Pemanfaatan bantuan alat pengolahan pangan, distribusi pupuk, dan penyediaan bibit tanaman pangan unggul.
 - c. *Pemberdayaan Berbasis Organisational Capital*: Pendampingan pengurusan legalitas usaha, seperti perizinan PIRT dan sertifikasi halal produk olahan pekarangan.
4. Tahap Pengawasan (*Controlling*): Pemerintah kecamatan dan desa melakukan monitoring secara berkala guna memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan target ketahanan pangan keluarga.

Analisis Efek Positif Pemberdayaan terhadap Ketahanan Pangan Keluarga

Hasil wawancara terstruktur dengan perempuan petani yang diverifikasi melalui triangulasi waktu dan sumber menunjukkan adanya perubahan nyata di tingkat rumah tangga:

1. Transformasi Peran dan Keterlibatan Pengambilan Keputusan: Stigma lama yang menempatkan perempuan tani sebagai pekerja kelas dua di sektor domestik mulai terkikis. Berdasarkan hasil wawancara, perempuan kini aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis usahatani, seperti menentukan jadwal tanam serta memilih komoditas tanaman pangan yang dibudidayakan (padi, ketela pohon, ubi jalar, kacang tanah, dan pisang).
2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Diversifikasi Produk: Pemberdayaan *human capital* mendorong perempuan untuk mengolah hasil panen mentah menjadi produk turunan bernilai jual tinggi (aneka keripik berlabel merek dagang). Penguatan *organisational capital* juga memungkinkan kelompok mengantongi izin PIRT, sehingga produk dapat dipasarkan lebih luas dan mendorong pendapatan ekonomi rumah tangga.
3. Identifikasi Faktor Pendukung Keberhasilan: Melalui triangulasi data lintas informan, teridentifikasi lima faktor utama yang mendorong keberhasilan program di lapangan:
 - a. *Dukungan Keluarga*: Adanya kebebasan dan dukungan moral yang kuat dari suami dan keluarga bagi istri untuk mengikuti pelatihan.
 - b. *Lingkungan Sosial-Budaya yang Kondusif*: Sekat pembagian peran tradisional mulai mencair, diiringi semangat belajar yang tinggi dari kaum perempuan.
 - c. *Growth Mindset (Pola Pikir Berkembang)*: Keinginan kuat dari perempuan petani untuk memperbaiki taraf hidup dan keluar dari kungkungan kemiskinan.
 - d. *Dukungan Pemerintah Kecamatan/Desa*: Peran aktif aparat birokrasi lokal dalam melakukan pendampingan intensif.
 - e. *Fasilitas Pemberdayaan*: Ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai di wilayah setempat.

PEMBAHASAN

Manajemen Perencanaan dan Implementasi: Peran Sinergis Kelembagaan KWT dan Pendekatan Modal Strategis

Temuan hasil analisis data menunjukkan bahwa manajemen pemberdayaan perempuan petani di Kecamatan Likupang Timur dijalankan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang melibatkan lintas sektoral (Dinas Pertanian, Dinas Pangan, serta DP3A). Proses perencanaan ini merujuk pada regulasi formal dan petunjuk teknis pengelolaan kawasan pangan yang terstandarisasi, seperti yang diatur oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2022) terkait pedoman teknis bantuan program pangan lestari. Sinergitas birokrasi ini di tingkat akar rumput diwujudkan melalui kelembagaan kelompok tani atau Kelompok Wanita Tani (KWT).

Hasil pembahasan ini sangat sejalan dengan temuan Atiqah (2026) serta Alfiah et al. (2026), yang menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat melalui kelembagaan KWT memegang peran sentral dan strategis sebagai wadah pengorganisasian untuk mengentaskan kerentanan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kelembagaan kolektif ini berfungsi memudahkan perempuan mengakses sumber daya produktif secara terstruktur. Lebih lanjut, strategi pemberdayaan yang berfokus pada *human capital* (pelatihan literasi pangan, keuangan, dan kewirausahaan) serta *technology capital* yang ditemukan di lapangan memperkuat argumen Irmayeni et al. (2025) serta Prasanthi et al. (2026). Kedua studi tersebut membuktikan bahwa intervensi manajerial yang terstruktur melalui pelatihan keterampilan dan optimalisasi pekarangan merupakan instrumen mutlak dalam mendorong kemandirian ekonomi

perempuan di wilayah perdesaan. Hal ini juga dikuatkan oleh Putri et al. (2025), yang menyatakan bahwa pendampingan pemberdayaan perempuan petani secara konsisten mampu menumbuhkan motivasi dan kapasitas diri untuk menunjang perekonomian rumah tangga.

Efek Pemberdayaan terhadap Ketahanan Pangan: Transformasi Peran dan Kontribusi Mikro

Dari aspek efek positif, temuan penelitian membuktikan bahwa pemberdayaan berhasil mendobrak hambatan struktural yang selama ini menempatkan perempuan tani pada posisi marjinal. Perubahan pola pikir (*growth mindset*) serta keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan usahatani mulai dari pemilihan komoditas (padi, ubi jalar, ketela pohon, kacang tanah, dan pisang) hingga diversifikasi produk olahan bernilai tambah berizin PIRT menunjukkan terjadinya penguatan agensi perempuan di tingkat rumah tangga.

Temuan ini sangat konsisten dengan hasil penelitian Kasim et al. (2025), yang membuktikan bahwa strategi pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan perluasan akses pasar efektif menjadikan perempuan tani sebagai agen perubahan (*agents of change*). Ketika dikaitkan dengan kerangka ketahanan pangan FAO (2019) yang mencakup dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas diversifikasi produk olahan pangan lokal memberikan kontribusi nyata terhadap kecukupan gizi dan kestabilan ekonomi rumah tangga. Hasil ini memperkuat temuan Atmadja et al. (2020) serta Yanti et al. (2025), yang menyatakan bahwa peranan ibu rumah tangga atau perempuan tani melalui program pengelolaan pangan/pekarangan lestari berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan mikro di tingkat keluarga. Pendapat serupa ditegaskan oleh Yanti et al. (2025) bahwa optimalisasi pelaksanaan program berbasis pangan lestari di berbagai daerah terbukti efektif menjaga stabilitas konsumsi pangan rumah tangga di tengah tekanan ekonomi. Lebih lanjut, temuan ini memperkuat argumen teoretis Sassi (2026) bahwa peningkatan agensi perempuan memiliki korelasi linier yang kuat dalam menangguhkan kerentanan pangan.

Relevansi Faktor Pendukung Keberhasilan dengan Perspektif Sosiologis dan Kebijakan

Analisis terhadap faktor pendukung keberhasilan pemberdayaan yakni dukungan keluarga/suami, pelonggaran norma sosial tradisional, motivasi internal yang tinggi, serta pendampingan aktif pemerintah memberikan penjelasan empiris mengapa program ini dapat diterima secara luas di Kabupaten Minahasa Utara. Kondisi tersebut selaras dengan temuan Sarker et al. (2024), yang mengidentifikasi bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada ketersediaan akses terhadap sumber daya (*access to resources*), dukungan sosial (*social support*), serta persepsi positif terhadap kebijakan (*policy perceptions*). Peran dukungan moral dari keluarga (khususnya suami) yang ditemukan dalam wawancara di lapangan juga memperkuat kerangka Gupta Soumya et al. (2019), yang menyatakan bahwa penghapusan hambatan kultural patriarkis dan penguatan modal sosial adalah prasyarat mutlak bagi optimalisasi kontribusi perempuan terhadap ketahanan pangan keluarga. Dengan demikian, keberhasilan manajemen pemberdayaan perempuan petani di Kecamatan Likupang Timur tidak hanya diukur dari aspek peningkatan produksi pertanian semata, melainkan dari terbangunnya sinergi yang utuh antara dukungan kultural, komitmen kebijakan birokrasi, penguatan kelembagaan KWT, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara komprehensif.

SIMPULAN

1. Manajemen dan Implementasi yang Sinergis: Pemberdayaan perempuan petani di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, telah dijalankan secara sistematis melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang melibatkan lintas perangkat daerah (Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan DP3A) serta berpedoman pada regulasi

- formal. Implementasinya difokuskan pada tiga modal utama, yaitu penguatan *human capital* (pelatihan literasi pangan, keuangan, dan kewirausahaan), *technology capital* (bantuan sarana dan teknologi pengolahan), serta *organisational capital* (penguatan kelembagaan Kelompok Wanita Tani/KWT dan legalitas usaha PIRT).
2. Transformasi Peran dan Penguatan Ketahanan Pangan: Program pemberdayaan terbukti mampu mendobrak hambatan struktural dan kultural, di mana perempuan petani kini bertransformasi menjadi agen perubahan (*agents of change*) yang aktif dalam pengambilan keputusan usahatani serta diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah. Hal ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan dimensi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas ketahanan pangan rumah tangga.
 3. Faktor Pendukung Keberhasilan: Keberhasilan program ini didorong oleh kuatnya dukungan moral keluarga (suami), pelonggaran norma sosial tradisional, tingginya motivasi internal (*growth mindset*) kaum perempuan, serta pendampingan aktif dan penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah dan kelembagaan lokal.

REFERENSI

- Alfiyah, N. I., Tini, D. L. R., Ardianingsih, V., & Resdiana, E. (2026). Pemberdayaan perempuan melalui KWT sebagai strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga: Studi Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati Putih Desa Ellak Daya. *Abhakte*, 4(1). <https://doi.org/10.24929/abhakte.v4i1.5097>
- Atiqah, R. (2026). *Partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Lampung Utara* [Skripsi/Diploma Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. Repository UIN Raden Intan Lampung.
- Atmadja, M. Y. H., Rangga, K. K., & Listiana, I. (2020). Peranan ibu rumah tangga pada Program Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JIIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 8(1), 176–181. <http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v8i1.4334>
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2022). *Petunjuk teknis bantuan pemerintah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Djuwendah, E., Karyani, T., Saidah, Z., & Hasbiansyah, O. (2021). Pelatihan budidaya sayuran secara vertikultur di pekarangan guna ketahanan pangan rumah tangga. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2>
- Irmayeni, D., Agustar, A., & Fitriana, W. (2025). Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga: Kasus kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Kota Padang. *Jurnal Niara*
- Istiqomah. (2021). Pemberdayaan perempuan di masa pandemi: Studi Kelompok Wanita Tani (KWT) Silih Asih Sindangjawa, Kuningan. *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12(1). <https://doi.org/10.32923/maw.v12i1.1728>
- Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., ... Purba, B. (2021). *Metodologi penelitian ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.
- Prasanthi, L. S., Putri, D. D., Karim, A. R., Sugiarto, M., & Dharmawan, B. (2026). Perception of female farmers and strategies for optimizing the Sustainable Food Yard Program (P2L) to support household food security in Banyumas Regency. *Jurnal Penyuluhan*, <https://doi.org/10.25015/22202669240>
- Putri, H. G., Iqbal, M., Utami, S., Syukur, A., Sonhaji, & Damayanti, R. (2025). Pemberdayaan perempuan petani dalam menunjang ekonomi keluarga. *JURNAL PADMA: Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), [Halaman].

<https://doi.org/10.56689/padma.v5i2.2321>

Sumual, T., Kawulur, A., & Wuryaningrat, N. (2023). *Pengantar manajemen*. Bintang Semesta Media.

Sumual, T., Soputan, G., & Wuryaningrat, N. (2019). *Manajemen pengembangan bisnis: Pengembangan empirik pada Tibo Tibo perempuan nelayan*. R.A. De Rozarie.

Yanti, R. A., Reza, M., & Nasrul, W. (2025). Optimalisasi pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 19(1), 44–55. <https://doi.org/10.31869/mi.v19i1.6729>